**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN PERATURAN
PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH**

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH	PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,	BUPATI BOGOR,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 138 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah;	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 138 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan mendukung pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah ditetapkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/ 2024, dan Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, perlu menetapkan Peraturan Bupati mengenai penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah;	b. bahwa dalam rangka percepatan proses pelayanan persetujuan bangunan gedung bagi Masyarakat berpenghasilan rendah perlu dilakukan penyederhanaan persyaratan dan pelayanan, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Mengingat:	Mengingat:

<p>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>
<p>2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>	<p>2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>
<p>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>
<p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>	<p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);	6. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);	7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);	8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 126);	9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 126);
	10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 67);
	11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.
	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 58), diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:	Tetap
<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bogor. 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang selanjutnya disingkat DPKPP, adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor. 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang selanjutnya disingkat DPUPR, adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor. 6. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Kabupaten Bogor. 7. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 8. Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disingkat MBR, adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. 	

9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10. Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR.
11. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
12. Rumah Susun Umum adalah Rumah Susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR.
13. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG, adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
14. Rencana Tapak adalah perencanaan lahan secara menyeluruh dengan menggunakan skala meliputi tapak bangunan, tata kaveling, tapak penggunaan lahan dan/atau infrastruktur lingkungan, berdasarkan izin pemanfaatan ruang, Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
15. Gambar Situasi adalah hasil pengukuran di lapangan untuk rencana pendirian bangunan dan/atau bangun bangunan pada sebidang tanah dengan menggunakan skala.
16. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat SIMBG, adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Surat Pemberitahuan, yang selanjutnya disebut SPT, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
19. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.	
BAB II RUANG LINGKUP	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kriteria MBR; b. Kriteria rumah bagi MBR; c. Pembebasan Retribusi PBG bagi MBR; d. Percepatan pelayanan PBG; e. Pelaporan; dan f. Pengawasan. 	Tetap
BAB III KRITERIA MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR. (2) Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan. (3) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau b. penghasilan orang perseorangan yang kawin. (4) Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri. (5) Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri. (6) Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan Rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang. (7) Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri. 	Tetap

<p>(8) Besaran penghasilan MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penghasilan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah); b. penghasilan paling banyak untuk kategori kawin sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah); dan c. Penghasilan paling banyak untuk kategori satu orang peserta Tabungan Perumahan Rakyat sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah). 	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Penghasilan MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor Pokok Wajib Pajak; b. SPT Tahunan apabila ada; c. Buku nikah atau akta nikah bagi yang berstatus kawin; d. slip gaji/surat pernyataan penghasilan dari pemberi kerja bagi pemohon yang berpenghasilan tetap; dan e. surat pernyataan besaran penghasilan bagi MBR yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah bagi pemohon yang tidak berpenghasilan tetap. 	Tetap
<p>BAB IV</p> <p>KRITERIA RUMAH BAGI MASYARAKAT</p> <p>BERPENGHASILAN RENDAH</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Rumah bagi MBR terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rumah Umum; b. Rumah Swadaya; dan c. Rumah Susun Umum. <p>(2) Kriteria Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. luas lantai paling besar 36 M²; b. diperuntukkan untuk rumah subsidi; c. harga rumah sesuai dengan batasan harga jual rumah umum tapak yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan perumahan rakyat; dan calon pemilik rumah MBR merupakan kepemilikan rumah pertama. <p>(3) Kriteria Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. luas lantai paling besar 48 M²; dan b. merupakan kepemilikan rumah pertama. 	Tetap

<p>(4) Kriteria Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. luas lantai paling besar 36 M²; b. diperuntukkan bagi MBR; c. harga rumah sesuai dengan batasan harga jual Rumah Susun Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan d. calon pemilik Rumah Susun Umum bagi MBR merupakan kepemilikan rumah pertama. 	
<p>BAB V PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH</p>	
<p>Bagian Kesatu Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan pembebasan Retribusi PBG bagi MBR kepada Badan Hukum dan/atau perorangan yang memenuhi persyaratan.</p> <p>(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk persyaratan Badan Hukum, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. memenuhi ketentuan perizinan dan nonperizinan untuk pembangunan Rumah Umum atau Rumah Susun Umum; dan 2. melakukan pembangunan Rumah Umum atau Rumah Susun Umum yang masuk dalam kriteria rumah MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. b. Untuk persyaratan perorangan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. penduduk di Daerah; 2. memenuhi kriteria MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan 3. memenuhi ketentuan perizinan dan nonperizinan untuk pembangunan Rumah Swadaya. <p>(3) Pembebasan Retribusi PBG bagi Rumah Umum dan Rumah Susun Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf c diajukan oleh Badan Hukum dan pembebasan Retribusi PBG bagi Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diajukan oleh perorangan.</p> <p>(4) Pembebasan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rumah Umum dan Rumah Susun Umum termasuk prasarana yang ditetapkan menjadi kawasan rumah MBR dalam Rencana Tapak.</p>	<p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Pembangunan Rumah Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tata Cara Pemberian Pembebasan Retribusi PBG untuk pembangunan Rumah Umum, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Badan Hukum mengajukan PBG untuk Rumah Umum melalui SIMBG dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Selain memenuhi persyaratan SIMBG sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Hukum wajib melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Tapak yang memuat keterangan tata letak bangunan khusus untuk kavling MBR; 2. melampirkan surat pernyataan harga rumah bagi MBR sesuai dengan batasan harga jual rumah umum tapak yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan perumahan rakyat, yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh bank pemberi kredit pembiayaan perumahan (KPR) fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP); dan 3. surat pernyataan keabsahan dokumen dari pemohon. c. Dalam hal pengajuan PBG memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan SKRD dengan nilai Retribusi PBG sebesar Rp0 (nol rupiah) atau nihil. d. Setelah diterbitkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam huruf c, DPMPTSP menerbitkan PBG bagi rumah MBR. 	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tata cara pemberian pembebasan Retribusi PBG untuk pembangunan Rumah Umum, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Badan Hukum mengajukan PBG untuk Rumah Umum melalui SIMBG dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pembangunan Rumah Umum dengan luas sampai dengan 3 (tiga) hektare, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS); b) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); c) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); d) Rencana Tapak yang memuat tambahan keterangan mengenai peil banjir, analisis dampak lalu lintas, Ruang Milik Jalan (RUMIJA) dan keterangan tata letak Bangunan khusus untuk kavling MBR; e) berita acara serah terima administrasi prasarana, sarana, dan utilitas, yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1) identitas para pihak yang melakukan serah terima; 2) rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran obyek yang akan diserahkan; 3) jadwal/waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana, sarana dan utilitas sesuai kesepakatan antara pengembang dan Pemerintah Daerah; dan 4) klausul penyerahan surat kuasa dari pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. f) lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);

	<p>g) melampirkan surat pernyataan harga rumah bagi MBR sesuai dengan batasan harga jual rumah umum tapak yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan perumahan rakyat, yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh bank pemberi Kredit Pembiayaan Perumahan (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP); dan</p> <p>h) surat pernyataan keabsahan dokumen dari pemohon.</p> <p>2. Untuk pembangunan Rumah Umum dengan luas lebih dari 3 (tiga) hektare sebagai berikut:</p> <p>a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS);</p> <p>b) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);</p> <p>c) dokumen lingkungan antara lain Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);</p> <p>d) Rencana Tapak yang memuat keterangan tata letak bangunan khusus untuk kavling MBR;</p> <p>e) berita acara serah terima cadangan tanah makam;</p> <p>f) berita acara serah terima administrasi prasarana, sarana, dan utilitas;</p> <p>g) lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);</p> <p>h) melampirkan surat pernyataan harga rumah bagi MBR sesuai dengan batasan harga jual rumah umum tapak yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan perumahan rakyat, yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh bank pemberi Kredit Pembiayaan Perumahan (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP); dan</p> <p>i) surat pernyataan keabsahan dokumen dari pemohon.</p> <p>b. Dalam hal pengajuan PBG memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan SKRD dengan nilai Retribusi PBG sebesar Rp0 (nol rupiah) atau nihil; dan</p> <p>c. Setelah diterbitkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam huruf b, DPMPTSP menerbitkan PBG bagi rumah MBR.</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pembangunan Rumah Swadaya</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Tata Cara Pemberian Pembebasan Retribusi PBG untuk pembangunan Rumah Swadaya, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon mengajukan PBG untuk pembangunan Rumah Swadaya melalui SIMBG dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Selain memenuhi persyaratan SIMBG sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemohon wajib melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. fotokopi identitas kependudukan di Daerah (KTP Kabupaten Bogor); 2. Gambar Situasi dengan memenuhi kriteria Rumah Swadaya bagi MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); 3. dokumen persyaratan kriteria MBR berdasarkan bukti besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 4. surat pernyataan kepemilikan rumah untuk pertama kali yang ditandatangani oleh pemohon. c. Dalam hal pengajuan PBG memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan SKRD dengan nilai Retribusi PBG sebesar Rp0 (nol rupiah) atau nihil. d. Setelah diterbitkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam huruf c, DPMPTSP menerbitkan PBG bagi rumah MBR. 	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Tata Cara Pemberian Pembebasan Retribusi PBG untuk pembangunan Rumah Swadaya, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon mengajukan PBG untuk Rumah Swadaya melalui SIMBG dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. fotokopi identitas kependudukan di Daerah (KTP Kabupaten Bogor); 2. Keterangan Rencana Kabupaten (KRK); 3. dokumen persyaratan kriteria MBR berdasarkan bukti besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 4. surat pernyataan kepemilikan rumah untuk pertama kali yang ditandatangani oleh pemohon. b. Dalam hal pengajuan PBG memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan SKRD dengan nilai Retribusi PBG sebesar Rp0 (nol rupiah) atau nihil; dan c. Setelah diterbitkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam huruf b, DPMPTSP menerbitkan PBG bagi rumah MBR.
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Pembangunan Rumah Susun Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Tata Cara Pemberian Pembebasan Retribusi PBG untuk pembangunan Rumah Susun Umum, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Badan Hukum mengajukan PBG untuk pembangunan Rumah Susun Umum melalui SIMBG dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Selain memenuhi persyaratan SIMBG sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Hukum wajib melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Tapak untuk Rumah Susun Umum bagi MBR; 2. melampirkan surat pernyataan harga rumah bagi MBR sesuai dengan batasan harga jual Rumah Susun Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah, yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>bank pemberi kredit pembiayaan perumahan (KPR) fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP); dan</p> <p>3. surat pernyataan keabsahan dokumen dari pemohon.</p> <p>c. Dalam hal pengajuan PBG memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan SKRD dengan nilai Retribusi PBG sebesar Rp0 (nol rupiah) atau nihil.</p> <p>d. Setelah diterbitkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam huruf c, DPMPTSP menerbitkan PBG bagi rumah MBR.</p>	
<p>BAB VI</p> <p>PERCEPATAN PELAYANAN PERSETUJUAN</p> <p>BANGUNAN GEDUNG</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan percepatan pelayanan PBG untuk pembangunan rumah bagi MBR yang menggunakan desain prototipe/purwa rupa rumah tinggal sederhana yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan perumahan rakyat.</p> <p>(2) Percepatan pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa percepatan proses penerbitan PBG paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Terhadap pelayanan PBG bagi MBR diberikan kemudahan dan percepatan kepada:</p> <p>a. Badan Hukum untuk pembangunan Rumah Umum bagi MBR dengan menggunakan desain prototipe/purwa rupa; dan</p> <p>b. Perorangan untuk pembangunan Rumah Swadaya dengan menggunakan desain prototipe/purwa rupa.</p> <p>(2) Kemudahan dan percepatan pembangunan Rumah Umum untuk Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Badan Hukum yang mengajukan permohonan secara langsung ke Mal Pelayanan Publik dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan</p> <p>b. memilih gambar desain prototipe/purwa rupa pada website SIMBG melalui alamat https://simbg.pu.go.id atau website OPTIMIS melalui alamat https://optimis.bogorkab.go.id.</p> <p>(3) Kemudahan dan percepatan pembangunan Rumah Swadaya untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada perorangan yang mengajukan permohonan secara langsung ke Mal Pelayanan Publik dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan</p> <p>b. memilih gambar desain prototipe/purwa rupa pada website SIMBG melalui alamat https://simbg.pu.go.id atau website OPTIMIS melalui alamat https://optimis.bogorkab.go.id.</p> <p>(4) Penerbitan PBG bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) jam terhitung sejak dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan lengkap.</p>

	(5) Prosedur pemberian percepatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB VII PELAPORAN	
Pasal 11	Tetap
<p>(1) Badan Hukum yang membangun Rumah Umum dan Rumah Susun Umum bagi MBR wajib melaporkan dan menyampaikan data konsumen MBR ke DPKPP.</p> <p>(2) Apabila Badan Hukum tersebut tidak melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala DPKPP melakukan teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.</p> <p>(3) Jika teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka Kepala DPKPP mengajukan usulan penetapan Badan Hukum ke dalam daftar hitam (<i>black list</i>) kepada Bupati.</p> <p>(4) Penetapan Badan Hukum ke dalam Daftar Hitam (<i>Black List</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(5) Badan Hukum yang telah ditetapkan ke dalam Daftar Hitam (<i>Black List</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat mengajukan perizinan dan nonperizinan pembangunan perumahan.</p>	
BAB VIII PENGAWASAN	
Pasal 12	Tetap
<p>(1) DPKPP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian pembebasan Retribusi PBG terhadap rumah bagi MBR.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengawasan terhadap ketepatan sasaran pemberian pembebasan Retribusi PBG terhadap MBR.</p> <p>(3) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan ditemukan Badan Hukum yang tidak membangun Rumah Umum dan Rumah Susun Umum bagi MBR serta menyampaikan persyaratan/data yang tidak benar, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan PBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan ditemukan perorangan yang tidak memenuhi kriteria Rumah Swadaya bagi MBR atau menyampaikan persyaratan/data yang tidak benar, maka dikenakan sanksi administratif</p>	

<p>berupa pencabutan PBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Badan Hukum atau perorangan yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), wajib mengajukan kembali proses PBG dan dikenai Retribusi PBG dan/atau denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>BAB IX KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p>Pasal 13</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.</p>
<p>Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 24 Desember 2024</p> <p>Pj. BUPATI BOGOR,</p> <p>ttd</p> <p>BACHRIL BAKRI</p>	<p>Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 16 Januari 2025</p> <p>Pj. BUPATI BOGOR,</p> <p>ttd</p> <p>BACHRIL BAKRI</p>
<p>Diundangkan di Cibinong pada tanggal 24 Desember 2024</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,</p> <p>ttd.</p> <p>AJAT ROCHMAT JATNIKA</p>	<p>Diundangkan di Cibinong pada tanggal 16 Januari 2025</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,</p> <p>ttd.</p> <p>AJAT ROCHMAT JATNIKA</p>